



Judul : 30 Persen Calon Tutup Riwayat Hidup
Tanggal : Senin, 06 Nopember 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

30 Persen Calon Tutup Riwayat Hidup

Tak satu pun calon anggota DPR yang didaftarkan oleh Partai Golkar dan PSI bersedia untuk membuka daftar riwayat hidupnya kepada publik. Di luar kedua partai itu, ada pula calon dari 16 partai lain yang bersikap serupa.

JAKARTA, KOMPAS — Sekitar 30 persen dari calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 tidak bersedia memublikasikan daftar riwayat hidupnya. Bahkan, tidak ada satu pun calon anggota DPR dari dua partai politik, yakni Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang bersedia untuk membuka daftar riwayat hidupnya.

Penelusuran Kompas di portal publikasi pemilu milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct.dpr>, sepanjang Minggu (5/11/2023), menemukan, 2.965 calon atau sekitar 30 persen dari 9.917 calon anggota DPR dalam daftar calon tetap (DCT) untuk Pemilu Legislatif 2024 tidak bersedia memublikasikan profilnya.

Sementara sisanya atau sekitar 70 persen calon anggota DPR bersedia membuka daftar riwayat hidupnya. Namun, itu pun tak semuanya bersedia un-

tuk memublikasikan keseluruhan materi dalam riwayat hidup.

Bahkan, tidak satu pun dari 580 calon anggota DPR yang didaftarkan oleh Golkar dan PSI yang bersedia untuk membuka daftar riwayat hidup. Semua profil calon dari Golkar dan PSI yang ditampilkan di laman KPU tersebut berwarna merah dan muncul pemberitahuan bahwa calon tidak bersedia jika profilnya dipublikasikan.

Di luar Golkar dan PSI, parpol dengan jumlah calon anggota DPR terbanyak yang tak bersedia memublikasikan daftar riwayat hidup adalah Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB). Dari 580 calon Demokrat, 577 orang tidak bersedia untuk membuka riwayat hidup. Hanya tiga calon Demokrat yang bersedia membuka riwayat hidup, yakni calon dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI nomor urut 8, Jawa Timur XI nomor urut 4, dan Sulawesi Tenggara nomor urut 5.

Dari PBB, ada 466 dari 470 calon anggota DPR yang tidak bersedia membuka daftar riwayat hidupnya. Keempat calon itu adalah calon dari dapil Jawa Timur III nomor urut 1, Jawa Timur VIII nomor urut 9, Jawa Timur IX nomor urut 3, dan Banten II nomor urut 5.

Adapun Partai Perindo menjadi parpol dengan calon yang paling banyak memublikasikan riwayat hidupnya. Dari total 578 calon yang didaftarkan Perindo, hanya satu yang tidak bersedia membuka daftar riwayat hidup. Kemudian, dari Partai Hanura, hanya dua calon yang tidak mau membuka dan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hanya enam calon yang menutup riwayat hidupnya.

Setelah DCT ditetapkan pada Jumat (3/11), KPU memublikasikan calon anggota legislatif (caleg) di semua tingkatan pada Sabtu (4/11). Profil yang ditampilkan berdasarkan persetujuan dari caleg. Jika caleg tidak bersedia memublikasikan daftar ri-

wayat hidup, maka data tidak akan ditampilkan.

Terkejut

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung terkejut atas temuan itu. Sebab, Golkar tidak memberikan kebijakan spesifik untuk mengizinkan ataupun tidak mengizinkan publikasi daftar riwayat hidup yang diserahkan ke KPU. Bahkan, ia kaget namanya termasuk dalam calon anggota DPR yang tak bersedia memublikasikan riwayat hidup.

"Kalau saya pribadi enggak ada masalah dibuka, kami ikuti aturan dan sistemnya. Kami akan mengeceknya ke KPU," kata Doli.

Golkar bahkan mendorong semua caleg yang didaftarkan untuk memublikasikan daftar riwayat hidup ke KPU. Sebagai salah satu parpol yang memperjuangkan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, Golkar ingin memilih lebih mengenal caleg yang akan me-

wakilnya di parlemen.

Oleh karena itu, setiap caleg harus memberikan ketercukupan informasi kepada pemilih, salah satunya dengan memublikasikan daftar riwayat hidup. Hal ini dibutuhkan agar pemilih mengetahui rekam jejak dan prestasi caleg.

Bahkan, di era perkembangan teknologi, pencarian informasi tentang caleg menjadi lebih mudah. Situasi ini perlu dibaca oleh caleg dengan memberikan informasi sebanyak mungkin ke KPU agar mudah pilihannya secara obyektif sesuai dengan rekam jejak dan kemampuan menjadi legislator.

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor juga mempertanyakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Sebab, PBB tidak pernah melarang calegnya untuk memublikasikan daftar riwayat hidup. Namun, dalam laman infopemilu, justru ada 99 persen caleg, termasuk

dirinya, yang dinyatakan tidak bersedia untuk memublikasikan daftar riwayat hidup.

"Saya rasa sistem di KPU RI yang bermasalah. Kami akan koordinasikan dengan tim Silon KPU," katanya.

Kompas juga telah meminta konfirmasi dari Ketua Badan Pemenuhan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief dan Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna, tetapi keduanya tidak memberikan penjelasan.

Adapun Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan akan mengecek ulang informasi mengenai caleg dalam laman KPU.

Komitmen transparansi

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrid) Hadar Nafis Gumay mengatakan, parpol justru dirugikan apabila banyak calegnya tidak mau membuka daftar riwayat hidup kepada para pemilih.

Citra parpol mengenai komitmen transparansi bakal me-

nurun akibat ulah caleg yang tidak mau memperkenalkan diri kepada pemilih. Padahal, caleg seharusnya banyak memperkenalkan diri karena meminta dipilih oleh masyarakat.

"Di sinilah partai harus mengambil sikap untuk memrintahkan seluruh calegnya membuka daftar riwayat hidup," ujarnya.

Di sisi lain, Hadar mendorong KPU agar mempunyai perspektif untuk meningkatkan kualitas pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya bisa memublikasikan daftar riwayat hidup yang diserahkan oleh caleg melalui parpol. Sebab, tidak semua data yang diserahkan merupakan informasi yang dicekualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seperti identitas, motivasi, dan program usulan jika terpilih. Data tersebut seharusnya dapat diakses publik karena akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan. (SYA)